

Mencari Pola Politik Islam yang Sesuai

Pengantar

Politik memang selalu menimbulkan perbedaan-perbedaan pandangan, juga di kalangan Islam. Sudah sejak masa kekhalifahan yang pertama, Islam terpecah dalam beberapa golongan, sampai pada mereka yang ber aliran keras, yang oleh K.H. Achmad Siddiq, dalam wawancara dengan Hotman Siahaan, di Situbondo dikatakan sebagai golongan fanatis radikal. Menggalang kekuatan Islam dalam politik yang terpecah-pecah dewasa ini, Kyai Achmad Siddiq mendukung diterapkannya konsepsi asas tunggal Pancasila. Sementara Dr. Ahmad Syafii Maarif mengatakan dalam wawancara dengan Ashadi Siregar di Yogyakarta, bahwa negara-negara Islam yang lahir belakangan, yaitu sesudah Khulafa'ur Rasyidin sesungguhnya menyimpang dari Qur'an, karena kitab suci itu tidak mengenal sistem dinasti. Pun pada Iran, yang menjadi republik Islam, terjadinya penyimpangan yang semakin jelas, terutama setelah Bani Sadr diusir dari negara itu.

Dalam wawancara dengan Arief Mudatsir, di Jakarta K.H. Saifuddin Zuhri mengatakan, bahwa di Indonesia, kekuatan politik Islam yang tergabung dalam Partai Persatuan Pembangunan tidak digerakkan sebagaimana mestinya, sehingga partai itu kurang mampu memberikan sumbangan yang berarti. Slogan-slogan yang dilontarkan partai ini hanya bersifat musiman, dengan memanfaatkan isu politik yang sedang ramai.

Dari Yogyakarta, H.A.R. Fachruddin, dalam wawancara dengan Ashadi Siregar mengatakan, bahwa kita tidak lagi bisa meniru cara kenegaraan di zaman Muhammad Rasulullah karena keadaannya berbeda. Juga tidak bisa dibandingkan dengan Brunei, sebab penduduk di sana lebih homogen, sementara di Indonesia terdiri dari berbagai agama. Ke arah pola politik mana sebenarnya umat Islam di Indonesia akan bergerak di masa datang, itulah yang dicoba ditelusuri dialog Prisma kali ini.

Redaksi.

Mayoritas Memberi, Minoritas Menuntut

K.H. Achmad Siddiq, Penasehat PB Syuriah NU dan Pengasuh Pondok Pesantren As-Shidieqiyah, Jember, Jatim.

Tanya: Bagaimana sesungguhnya konsep Islam tentang politik dan perwujudannya sejak zaman Nabi Muhammad Rasulullah, Khulafa'ur Rasjidin dan dinasti-dinasti Islam sesudahnya, seperti Umayyah, Abbasiyah?

Jawab: Kalau ingin memahami Islam di dalam perkembangannya, harus menelusuri sejarah, karena masalah politik dalam Islam justeru muncul sepeninggal Nabi. Pada masa

Nabi tidak ada masalah. Sepeninggal Nabi, baru muncul perbedaan paham yang waktu itu mengenai siapa pengganti Nabi sebagai pemimpin dunia. Nah, ini 'kan pemerintahan, politik. Jadi, pertentangan pertama kali dalam sejarah Islam antara umat Islam yang satu dengan yang lainnya justeru soal politik.

Nabi meninggal hari Senin, tetapi baru malam Rabu dimakamkan, karena belum ada

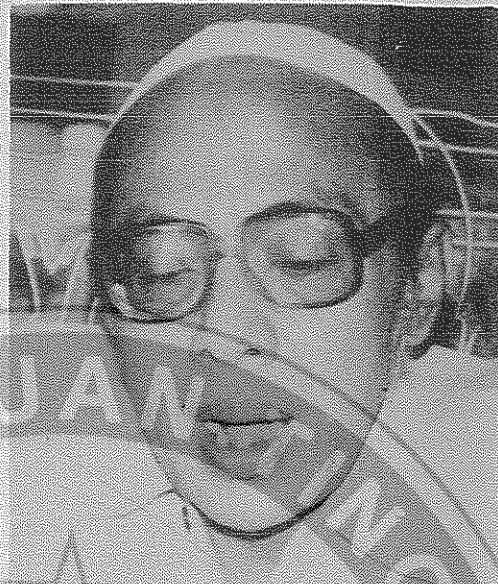
mufakat tentang siapa pengganti Nabi. Jadi masih terjadi pertentangan antara kelompok Muhajirin—yaitu yang berasal dari Mekkah—dengan Ansur yang di Medinah. Keduanya belum bertemu pendapat, sampai akhirnya ketika pertentangan sedang memuncak, Sayidina Umar berdiri dan berkata, "Saudara-saudara, kita tahu bahwa selama Nabi sakit, Nabi selalu menyuruh Abu Bakar menjadi Imam. Jadi saya yakin, kalau Nabi sudah rela diwakili Abu Bakar di dalam urusan agama, maka saya lebih yakin bahwa dalam urusan dunia beliau akan lebih rela diwakili Abu Bakar". Karena itu, kata Umar, saya akan melakukan *bai'at*, akan fitrah, inilah penerus pengganti Nabi. Langsung Umar berdiri dan menjabat tangan Abu Bakar dan berkata, "Saya mem-*bai'at* saudara" (katakanlah sebagai kepala negara dalam pengertian sekarang ini). Tindakan Umar ini diikuti semua orang yang hadir. Keadaan waktu itu memang bersifat darurat. Tindakan Umar memang terdesak keadaan. Sehingga tidak bisa dibaca sebagai cara Islam menyelesaikan persoalan politik itu. Yang jelas, untuk masa sekarang dapat dikatakan tidak demokratis sungguh-sungguh.

T: Tapi apa ada hubungan antara aliran Syiah dan Sunni? Sebab mungkin ada hubungannya dengan Abu Bakar yang menjadi Aliran Sunni, sedangkan yang Syiah sebenarnya menginginkan, pengganti Nabi dari keturunan Nabi. Apa benar?

J: Ya, itu timbulnya sesudah Umar, sesudah Abu Bakar diteruskan Umar, diteruskan Usman, lalu Ali. Di sini persimpangan itu semakin tajam. Usman sebagai Kepala Negara dibunuh. Pembunuhan politik. Menurut Sayidina Ali, pelakunya harus ditangkap. Ini perlu, supaya para wali bisa dikenal dan dibawa ke satu pimpinan. Tapi Mu'awiyah yang kebetulan Gubernur di Syria, mengatakan terhadap pembunuh harus diberlakukan hukum Tuhan. Ali mengatakan, kita harus membentuk perangkatnya dulu, yaitu pemerintah, dan pemerintah ini yang melaksanakan tugas tadi!

T: Jadi waktu itu sudah ada masalah antara pemerintah dengan peranan agama?

J: Sudah. Bahkan sampai timbul pertem-



K.H. ACHMAD SIDDIQ

puran. Ali yang dinobatkan sebagai Kepala Negara menuduh Mu'awiyah pemberontak, karena tidak mau mengikuti pemerintah yang sah. Mu'awiyah, berpendapat pemerintah itu belum sah. Terjadi perang. Mu'awiyah terdesak, dan diadakan perundingan. Akibat perundingan ini, terjadi pertentangan di antara pengikut Ali. Terjadilah semacam kekacauan dalam perundingan, dan pengikut Ali mengatakan, "Dengan ini kami memecat Ali". Namun delegasi yang dipimpin Mu'awiyah mengatakan: "Kami tidak mau". Di sinilah Ali dianggap serong. Ini kesalahan Mu'awiyah, dan kesempatan munculnya golongan *Khawarij*. Golongan *Khawarij* ini radikal. Mereka mengatakan bahwa Ali adalah "kafir", bukan karena sekedar bersalah, sebab mereka pun mengatakan Mu'awiyah itu kafir. Yang benar menurut mereka, Hukum Allah dengan semboyan "Tidak ada hukum kecuali di tangan Allah". *Khawarij* inilah aliran radikal Islam yang pertama, dan tidak tanggung-tanggung, karena gerakan politik mereka mempengaruhi hukum. Menurut mereka, orang Islam harus patuh seratus persen dan loyal kepada hukum Tuhan. Kurang dari itu adalah kafir. Berdosa adalah kafir. Jadi menurut kamus *Khawarij*, pemerintah yang tidak menjalankan syariat atau perintah Tuhan itu kafir. Karena kafir, maka

halal untuk diperangi. Halal untuk dibunuh. Inilah yang dipakai Darul Islam. Jadi menurut Khawarij orang itu baru dinamakan Islam kalau Iman. Melanggar iman adalah dosa, karena iman berarti taat. Kalau tidak taat, entah dia melakukan pelanggaran atau dia tidak menjalankan tugas, adalah kafir. Di dalam sejarah orang Khawarij merupakan orang yang paling taat dan tekun menjalankan sembahyang, sebab mereka tidak mau menyeleweng. Jadi tiap-tiap pelanggaran atau penyimpangan dari garis Tuhan dianggap kafir. Jadi menurut mereka, tidak ada dosa besar dan dosa kecil. Pokoknya menyimpang, kamu berarti menentang Tuhan. Ini peraturan yang sangat keras.

Kemudian, ada sisi perbedaan. Muncul pula golongan *Mu'tazilah*, yang oleh orang Barat dikatakan Nasionalisme. Menurut mereka, sesudah Nabi harus diganti Ali, keturunan Nabi. Pergantian sudah terjadi, Nabi diganti Abu Bakar, padahal menurut mereka Abu Bakar perampok, pembegal. Umar dan Usman serupa. Ini menurut "Islam"-nya Khomaeni. Di sini terjadi pertentangan sesama umat Islam. Menurut mereka itu (Syiah), Abu Bakar, Umar, Usman telah melakukan penyerobotan. Nah, itulah pola pandangan pokok umat Islam.

Ahlusunnah adalah Sunni. Mayoritas Islam di Indonesia adalah Sunni. Termasuk saya.

T : *Jadi Indonesia bukan negara Islam. Namun bagaimana penduduk Islam yang mayoritas ini menyalurkan aspirasi politiknya? Kita lihat gerakan-gerakan Islam sebelum kemerdekaan, seperti munculnya SI, Muhammadiyah, NU dan lain-lain, kemudian MIAI dan Masyumi sebagai perwujudan peran umat Islam dalam berbangsa dan bernegara?*

J : Dalam Munas NU di Situbondo tahun yang lalu, banyak hal yang muncul. Misalnya, ketika diterimanya Pancasila sebagai azas tunggal, banyak orang mengira bahwa itu hanya untuk menyelamatkan eksistensi NU. Malah banyak yang menaruh purba-sangka kalau itu seolah-olah titipan dari Pemerintah.

T : *Jadi itu bukan titipan ya pak?*

J : Bukan. Itu tidak benar. Malah pemerintah yang membantah. Pokoknya seluruh ulama NU ingin menempatkan diri sebagai pemimpin umat Islam, yakni bagaimana supaya sejajar dengan "Umaro", di mana diharapkan ada kerjasama dan pandangan yang sama tentang masa depan antara Umaro' sebagai pemerintahan yang formal, dengan ulama dari sisi informal. Bangsa Indonesia, mayoritas Islam. Nah, di sinilah, setelah pemerintah itu mengkaji, timbul rasa optimis.

Munas di Situbondo ini bukan hanya insidental. Tetapi sebenarnya ada yang lebih jauh dari itu. Kami ingin mencoba melihat masa depan, sebab, sejak Piagam Jakarta sampai sekarang, ada semacam keretakan batin umat Islam di negara ini, tetapi siapa orang atau golongan yang tepat dan berwenang untuk menjadi juru bicara Islam?, karena justeru yang mengakui dirinya Islam itu centang perenang. Malah berbenturan satu sama lain. Yang mana yang Islam? Citra Islam di sini sudah kabur, sehingga kalau ada orang bertanya, Islam menurut Tuhan itu yang bagaimana, sebab ada Islam menurut Hamka, Islam menurut Natsir, Islam menurut Kartosuwiryo, Saya, ingin Islam menurut Tuhan. Golongan saya ini, golongan Ahlusunnah dianggap bukan Islam. Padahal di tahun 1935 NU sudah memutuskan, negara ini Islam. Termasuk wilayah Islam. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Malah Bung Karno, yang mencetuskan Pancasila, juga termasuk diangkat NU. Jadi NU juga sejak dulu mendukung Pancasila.

Kita lihat semua orang bertepuk tangan waktu pertama kali Khomaeni tampil, sebagai satu-satunya negara yang melawan Uni Soviet, dan Amerika Serikat. Orang lupa Syiah itu apa. Kalau tahu isi Syiah apa, orang pun akan berpikir dulu. Dalam perkembangannya Syiah tidak mengakui hadist, tidak mengakui ulama juga pendapatnya kecuali dari golongan sendiri. Jadi siapa pun yang mengatakan sabda Nabi kalau bukan golongan mereka, tidak mereka akui. Menurut Syiah pun kepala negara adalah wasiat Nabi. Tidak bisa sembarang orang. Di Iran gejala ini terlihat. Mereka mau mendirikan suatu pemerintah dunia di mana seluruh umat Islam disuruh mengakui satu pusat, Iran.

Dulu Islam dipelopori Arab. Kepemimpinannya kemudian digantikan Turki. Sekarang giliran Persi, sebab tiga bagian ini sama-sama berjasa. Jadi Iran menuntut gilirannya untuk memimpin Islam. Itu sebabnya Khomaeni mau mengeksport revolusi. Seluruh dunia Islam harus ikut dia.

Dalam suatu penerbitan di Yogya, saya dicemooh sambil mengatakan bahwa Indonesia adalah negara berhala. Ini sama dengan Nabi, ketika menghadapi Mekkah yang negeri berhala. Terhadap yang berhala itu tidak ada jalan; Perang atau Islam. Nah, kita menghadapi ini. Tidak ada toleransi dari Neo Khawarij. Seharusnya ada orang yang bisa menjelaskan di mana letak perbedaan pandangan seperti itu.

T: Bagaimana sebenarnya para Khawarij itu menyalurkan aspirasinya, sebab PPP sekarang ini merupakan satu-satunya partai yang secara eksplisit mengatakan dirinya sebagai pembawa aspirasi Islam. Golkar dan juga PDI sebagian pendukungnya adalah Islam. Secara kelompok maupun perorangan mereka ini mengatakan membawa aspirasi Islam. Dalam konteks ini, bagaimana peta politik umat Islam di Indonesia?

J: Sekarang ini yang lebih penting untuk diselesaikan adalah pemimpin. Justeru ini yang harus diteropong. Khawarij, Syiah sudah masuk ke negara kita. Anak buahnya sudah banyak di antara kita, terutama generasi muda. Maklum, anak-anak muda itu kadang-kadang tidak mengerti logikanya. Banyak anak muda yang mengerti politik tetapi tidak mengerti agama. Semangat mereka luar biasa karena diberi uang, dan senjata. Persoalan ini harus dibicarakan lebih luas dan mendalam. Jangan sambil lalu saja. Masalahnya bukan sekedar teori, tetapi ini menyangkut untuk masa depan umat Islam di Indonesia. Kalau Islam merasa mayoritas, marilah kita berpikir mayoritas. Jangan kita itu mayoritas tetapi bermental minoritas. Selama ini Islam hanya menuntut. Itu 'kan gila. Terbalik. Kalau saya Kristen, saya menuntut. Sekarang terbalik. Sampai ada golongan Islam, ada Umat Islam. Jadi orang-orang di partai Islam ada yang melakukan penggolong-golongan. Orang seperti ini hanya mau mengakui dirinya sendiri. Namun

yang sekarang dikembangkan pemerintah itu umat Islam. Ini meliputi semua golongan termasuk ABRI.

Sekarang, konsep untuk itu yang ada pada saya, dan saya perjuangkan sehingga, ketika makalah saya yang di Munas Situbondo dikutip media massa, ada orang Islam yang Golkar nangis. Katanya: *Waduh, pak Haji, saya diakui.*

Dia itu merasa diakui, sebab saya katakan, orang NU, sebagai warganegara, punya hak untuk memilih partai yang mana saja. Bukan hanya PPP, tapi memilih partai yang mana saja untuk menyalurkan aspirasinya.

Selama ini ada *gap*. *Gap* antara dua kubu. *Gap* ini berkembang menjadi konflik situasi. Apakah ini akan diteruskan? Di sini harus menjembatani agar potensi nasional ini bukan hanya minoritas, tetapi mayoritas, di mana Islam ikut serta.

Golkar ingin menunjukkan mayoritas adalah Golkar. Buktinya dalam Pemilu Islam kalah. Ini namanya rebutan. Seharusnya tidak begitu. Saya ingin merangkul semua Islam. Masalahnya, bagaimana pandangan kita terhadap negara. Kalau ini sudah ketemu, kemudian bagaimana kita dengan Pancasila. Kalau sudah ketemu akan gampang. Lantas saling mengisi. Kalau begini baru namanya umat Islam merupakan potensi. Kalau sekarang mungkin malah yang minoritas yang memainkan peranan dan mayoritas hanya namanya saja. Pola lama jangan diteruskan lagi. Mari mengadakan introspeksi. Mari berunding, bagaimana baiknya.

Kaum Khawarij tidak bisa diajak kompromi. Dia ingin Indonesia Islam penuh. Khawarij tidak bisa tambal sulam. Bagi dia, *Presiden harus saya*. Sama seperti Syiah. Tidak mengenal kompromi. Bagi dia yang ada hanya Imam. Tidak ada pertimbangan lain. Pokoknya perintah Imam. Perintah termasuk iman. Imam termasuk iman. Ini Syiah. Ini yang ditiru-tiru oleh sebagian orang sampai mengkultuskan pemimpin. Namun, Khawarij yang paling berat, dan yang mulai lahir di sini, sebab Khawarij ini dibesarkan dan ditumbuhkan situasi yang matang. Jadi fanatismena hampir sama dengan PKI. Cuma bedanya, dia beragama, PKI tidak. Berani mati, berani berkorban dan mereka membutuhkan si-

tuasi yang matang. Kalau sudah matang semakin didesak, dicurigai, Khawarij akan tumbuh dan subur. Sama dengan kemiskinan umpamanya. Kalau miskin, komunis tumbuh. Namun kalau keadaan bisa dikendalikan, tidak ada tempat buat Khawarij. Sama dengan PKI, tidak ada tempat. Bila cuma berteori tetapi alamnya begini ini, ya tak ada guna.

T: Islam dan Pancasila dalam kesepakatan nasional tidak bisa dipertentangkan. Tapi bagaimana dengan azas Tunggal Pancasila yang akan diberlakukan bagi Orpol dan Ormas di Indonesia. Di mana posisi masing-masing?

J: Uraian saya sudah menjelaskan, bahwa saya menerima azas tunggal untuk NU. Saya sudah meringankan beban yang dilihat dari sudut agama. Saya mau menanamkan ini pada siswa di pondok saya, supaya pandangannya tentang Islam itu betul-betul totalitas.

T: Jadi semacam fanatisme begitu pak?

J: Ya. Fanatisme dalam arti positif. Bukan membuta. Fanatisme buta, bahaya.

T: Tapi bagaimana dengan Pancasila?

J: Jalan untuk umat Islam di Indonesia harus diperjuangkan, sebab sedang menghadapi macam-macam masalah. Saya justeru berangkat dari situ, sebab, menurut saya, generasi yang akan datang akan tetap bingung kalau tidak dimulai dirintis dari sekarang. Jalan harus dibuat. Generasi berikut harus diberi tahu jalan mana yang seharusnya ditempuh. Ini yang ingin saya garap. Sampai sekarang baru kerangkanya saja. Saya sedang menyusun 9 kerangka. Kalau perlu diseminarkan, didiskusikan, sebab ada yang menganggap Pancasila bertentangan dengan Islam. Sebenarnya, kalau bertentangan, pemimpin-pemimpin Islam terdahulu tidak akan mengakuinya. Tapi justeru Muhammadiyah, NU, PSII ikut menandatangani Pancasila dan yang melahirkan. Kenapa justeru sekarang ada yang meragukan Pancasila?

T: Apa itu bukan karena kesenjangan aspirasi saja pak?

J: Malahan lebih jauh lagi, karena umat Islam memang pernah mengalami kekecewaan pada masa Bung Karno akibat dihapusnya kata-kata *dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya*, seperti dalam Jakarta Charter. Kata Bung Karno pada waktu itu: *Sudahlah, nanti kalau keadaan sudah normal, kita sudah... dan akhirnya konstituante gagal*. Tentu saja umat Islam kecewa, apalagi kemudian Bung Karno sendiri menantang, yang diikuti Natsir, pimpinan puncak Islam. Waktu itu Masyumi marah. Kekecewaan memang tambah parah. Parmusi, lewat Roem bilang, hendak disahkan, tapi tak ada realisasi. Kekecewaan berlanjut. Kasus-kasus seperti ini yang ingin saya kikis. Kalau diteruskan pembangunan tidak akan pernah terselesaikan, karena masih akan ada saja orang Islam mengkhayalkan negara yang menjadi harapannya Utopis. Dia tidak mau mengakui Indonesia ini.

T: Jika begitu bagaimana perspektif masa depan kehidupan politik di Indonesia dan peran agama Islam?

J: Dibentuk oleh cara berpikir. Yang menjadi soal, mayoritas umat Islam di Indonesia ini siapa.

T: Kelihatannya ada golongan-golongan yang vokal yang nampaknya ekstrim.

J: Golongan ekstrim ini tumbuh karena faktor ketidakadilan, faktor di mana tidak adanya demokrasi, faktor di mana porsi politik tidak adil, dan faktor korupsi. Faktor-faktor seperti menggugah macan tidur. Sekalipun saya ini Ahlusunnah misalnya, saya bisa jadi pengikut Khawarij didorong faktor-faktor tadi, dan bisa melawan mereka. Bukankah semboyan mereka dalam politik tidak ada belas kasihan. Harus direbut. Lalu menyusun kekuatan dan dengan kekuatan itu mengambil alih kekuasaan. Sebenarnya mereka orang biasa. Cuma didorong keadaan, mereka bisa beralih ekstrim.

T: Kalau demikian masalahnya, bagaimana kita mencegah proses ke arah sana?

J: Diperlukan saling pengertian semua pihak.